

DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BERAU



LKJIP - 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau tahun 2021 dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggung jawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Secara lengkap LKJIP memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Secara sistematis, laporan ini merupakan rangkaian dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikitisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RKPD Tahun 2021 yang merupakan penjabarandari RPJMD tahun 2021-2026. LKjIP ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi seluruh stakeholders mengenai pencapaian Diskoperindag Kabupaten Berau.

Secara umum kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau telah banyak memberikan hasil yang bisa dinikmati masyarakat, namun kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki, semoga ditahun yang akan datang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan serta partisipasi dalam rangka penyusunan LKjIP Diskoperindag Kabupaten Berau tahun 2021 ini.

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Tanjung Redeb, Februari 2022

Kepala Dinas,

Drs. S A L I M

Pembina Utama Muda

NIP. 19621227 199003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKJIP sebagai laporan yang memuat perbandingan antara perencanaan dan hasil dari kinerja pemerintah daerah, secara sistematis menjabarkan rangkaian dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana setiap Instansi/Lembaga Pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan public. LKjIP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencanakerja (performance plan) yang merupakan sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RPJMD 2021-2026 yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

Sebagaimana sasaran strategis yang tertuang dalam RENSTRA Diskoperindag Kabupaten Berau tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2021 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp.18.605.612.778,00** yang terbagi dalam 16 (enam belas) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 94,23% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar **Rp.17.478.907.514,00**. Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori penilaian **Sangat Baik**.

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. 1.363.896.000,- dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp.1.229.307.293,00 dengan persentase 90,13%, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal dinas dengan sasaran strategis tersedianya data pegawai dan data aset.

Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu kami sudah melakukan upaya antisipasi agar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang capaian kinerja dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini sangat penting bagi Diskoperindag Kabupaten Berau untuk melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggung jawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap LKJIP memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Secara sistematis, laporan ini merupakan rangkaian dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikitisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan LKJIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan LKJIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD. Penyelenggaraan LKJIP meliputi: rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; dan reviu dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Koperindag Kabupaten Berau.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperindag Kabupaten Berau adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Berau. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Berau.

1.3 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Dinas merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- d) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e) Pelaksanaan UPTD;
- f) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang diatur dalam Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

- Sub Bagian Penyusunan Program;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah membawahi:

- Seksi Pemberdayaan Koperasi;
- Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi;
- Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

d. Bidang Perindustrian, membawahi:

- Seksi Agro dan Hasil Hutan;
- Seksi Kimia, Logam dan Mesin;
- Seksi Elektronik dan Aneka;

e. Bidang Bina Usaha Perdagangan, membawahi:

- Seksi Perdagangan Dalam Negeri ;
- Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;

f. Bidang Sarana perdagangan, membawahi:

- Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan;
- Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan;
- Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;

g. UPTD

h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis wajib memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan mengalami permasalahan-permasalahan antara lain:

1. Permasalahan utama Bidang Industri: Belum berkembangnya industri kreatif

Keberhasilan industri akan sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di suatu daerah. Peningkatan sektor industri dapat dilakukan melalui peningkatan industri kreatif, yang ditujukan demi pemerataan kapasitas industri suatu daerah, lebih tepatnya industri-industri yang memiliki sifat kompetitif unggulan. Dibuatnya rencana meningkatkan sektor industri bisa mengembangkan penghasilan para pemilik serta karyawan industri itu sendiri, dan tak lupa menetapkan struktur industri di pelosok desa agar bisa memberikan suatu nilai lebih untuk desa tersebut. Dari bidang Industri tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Industri: Belum optimalnya pengembangan Industri

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan	Rendahnya ketrampilan pelaku industri

industry	Kurangnya penerapan teknologi dalam pengembangan IKM
----------	--

2. Permasalahan utama Bidang Perdagangan: Masih rendahnya nilai ekspor

Daya saing merupakan salah satu kriteria yang menentukan keberhasilan suatu daerah di dalam perdagangan nasional. Nilai ekspor yang semakin menurun mengindikasikan bahwa daya saing Kabupaten Berau di perdagangan nasional semakin menurun. Kekayaan alam yang melimpah seperti ini kurang berperan dalam peningkatan daya saing Kabupaten Berau. Demikian sebaliknya, jika daya saing meningkat hal ini mengindikasikan bahwa produk lokal Kabupaten Berau memiliki kualitas unggulan sehingga mendapat pasar nya sendiri di luar kabupaten. Dari bidang Perdagangan tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:

Tabel 1.2

Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Perdagangan: Masih rendahnya daya saing produk ekspor

Permasalahan	Akar Masalah
Masih rendahnya daya saing produk ekspor	Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga
	Belum Optimal nya perlindungan konsumen
	Masih Rendahnya Kualitas dari produk lokal yang diekspor

3. Permasalahan utama Bidang Koperasi Dan UMKM: Koperasi dan UMKM belum menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah

Koperasi merupakan lembaga yang seharusnya menjadi roda penggerak utama dalam perekonomian suatu daerah. Namun di Kabupaten Berau, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan Koperasi dan UMKM belum dapat berfungsi demikian. Hal ini dikarenakan belum adanya produk-produk lokal daerah yang berkualitas yang dapat dipromosikan menjadi produk unggulan daerah. Serta dari segi modal, UMKM kesulitan dalam hal permodalan sehingga kurang berkembang. Dari bidang Koperasi

dan UMKM tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:

Tabel 1.3
Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Koperasi Dan UMKM:
Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi

Permasalahan	Akar Masalah
Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi	Diversifikasi produk UKM masih terbatas
	fasilitas permodalan belum maksimal
	Kurangnya promosi produk-produk UMKM
	Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)

1.5 Sistematika Penyusunan Laporan

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2017 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

b. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA
BERKELANJUTAN**

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

- 1) Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

- 2) Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
- 3) Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
- 4) Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Berau mengikuti misi kedua yaitu **Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.** Dinas Koperindag perlu membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan misi kedua tersebut. Di dalam misi tersebut terdapat indikator laju pertumbuhan ekonomi, Dinas Koperindag memiliki kontribusi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi karena salah satu sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan dan perindustrian, baik perindustrian besar maupun kecil menengah.

2.2 Penetapan Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategik dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta Koperasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran:

- Meningkatkan Peran serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat, agen distributor dan pelaku usaha
- Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap pengembangan perekonomian daerah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperindag Kabupaten Berau
Pada Rencana Strategis 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA
				2021
1	Meningkatkan Peran Serta Koperasi dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah			
		Meningkatnya Koperasi yang Sehat dan Akuntabel	Presentase Koperasi Aktif	62%
			Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	40%
		Meningkatnya Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	20%
			Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	0,5%
2	Meningkatkan Peran Serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah		Jumlah UMKM Aktif	1350 UMKM
		Meningkatnya Produktifitas, nilai tambah, Akses pasar, dan Akses Pembiayaan UMKM	Jumlah Usaha mikro dan kecil	42
			Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	24%
			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,4%
			Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,5%
3	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Barang penting bagi Masyarakat, Agen Distributor dan Pelaku Usaha			
		Meningkatnya Pendapatan dari sektor Perdagangan	Presentase Eksportir Baru yang Menggunakan SKA	42%

		Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0,5%
			Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	0,2%
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen di Seluruh Wilayah Kabupaten	Presentase Peningkatan jumlah konsumen yang dilayani melalui Tera/Tera Ulang	12%
		Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif	70%
4	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap pengembangan perekonomian daerah			
		Meningkatnya Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	1%
		Meningkatnya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	11%
			Presentase Pengendalian Izin Usaha Industri terhadap jumlah Industri yang terdata	
			Presentase Pengawasan terhadap industri Kecil menengah	24%

Sumber : Renstra Diskoperindag Kab. Berau 2016-2021

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun strategi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	SRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan local			
1	Meningkatkan Peran Serta Koperasi dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Koperasi yang Sehat dan Akuntabel	Peningkatan Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Perkoperasian	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		Meningkatnya Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Koperasi	Program Peningkatan Manajemen Koperasi
2	Meningkatkan Peran Serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Produktifitas, nilai tambah, Akses pasar, dan Akses Pembiayaan UMKM	Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
			Peningkatan sarana promosi produk daerah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah
3	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Barang penting bagi Masyarakat, Agen Distributor dan Pelaku Usaha	Meningkatnya Pendapatan dari sektor Perdagangan	Peningkatan aktifitas perdagangan lokal	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

		Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Peningkatan Monitoring stok dan harga barang kebutuhan pokok	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen di Seluruh Wilayah Kabupaten	Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
		Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pemeliharaan sarana dan Sarana perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
4	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap pengembangan perekonomian daerah	Meningkatnya Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Meningkatnya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2019 adalah penjabaran dari pada program Diskoperindag Kabupaten Berau yaitu: Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan, Diskoperindag Kabupaten Berau menetapkan 13 (Tigabelas) program dan 39 (Tiga Puluh sembilan) Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
 - Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Sosialisasi Kinerja Program SKPD
 - Konsolidasi Perencanaan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 - Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.
 - Fasilitasi Kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah
 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
 - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (CEFE)
 5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Pengembangan UMKM
 6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
 - Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
 - Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 - Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi.
 7. Program Perlindungan dan Pengawasan Perkoperasian

8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
 - Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Tentang Perlindungan Konsumen
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
 - Forum Komunikasi SKA Bidang Perdagangan Luar Negeri
10. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 - Operasional Pasar
 - Pelaksanaan Pasar Murah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar
 - Pengembangan Pasar dan distribusi Barang/produk (DAK)
11. Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah.
12. Fasilitas Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
 - Fasilitas Sertifikasi Halal
 - Dekranasda.
13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

2.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, seperti dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA AWAL	CAPAIAN
			2021	2021
1	Meningkatkan Peran Serta Koperasi dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah			
		Presentase Koperasi Aktif	54%	63%
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	31%	44%
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	24%	30%
		Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	12%	14%
2	Meningkatkan Peran Serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah UMKM Aktif	2155 UMKM	3412 UMKM
		Jumlah Usaha mikro dan kecil	2009	3102
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	41%	56%
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,1%	0,4%
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,1%	0,4%
3	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Barang penting bagi Masyarakat, Agen Distributor dan Pelaku Usaha			
		Presentase Eksportir Baru yang Menggunakan SKA	31%	41%
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0,2%	0,5%

		Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	12%	14%
		Presentase Peningkatan jumlah konsumen yang dilayani melalui Tera/Tera Ulang	32%	32%
		Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif	40%	50%
4	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap pengembangan perekonomian daerah			
		Jumlah Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0,6%	1%
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	12%	21%
		Presentase Pengendalian Izin Usaha Industri terhadap jumlah Industri yang terdata		
		Presentase Pengawasan terhadap industri Kecil menengah	0,2%	0,4%

2.6 Penetapan Kinerja

Dengan didukung oleh sejumlah program dan kegiatan, selanjutnya dibuat Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melalui Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2021 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta Target yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
				2021
1	Meningkatkan Peran Serta Koperasi dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah			
		Presentase Koperasi Aktif	%	62%
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	40%
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	20%
		Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	%	0,5%
2	Meningkatkan Peran Serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah UMKM Aktif	UMKM	1350 UMKM
		Jumlah Usaha mikro dan kecil	UMK	42
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	24%

		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	0,4%
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,5%
3	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Barang penting bagi Masyarakat, Agen Distributor dan Pelaku Usaha			
		Presentase Eksportir Baru yang Menggunakan SKA	%	42%
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	0,5%
		Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	%	0,2%
		Presentase Peningkatan jumlah konsumen yang dilayani melalui Tera/Tera Ulang	%	12%
		Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif	%	70%
4	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap pengembangan perekonomian daerah			
		Jumlah Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	%	1%
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	11%
		Presentase Pengendalian Izin Usaha Industri terhadap jumlah Industri yang terdata		
		Presentase Pengawasan terhadap industri Kecil menengah	%	24%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja tahun 2021

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan UMKM yang dijabarkan dalam 16 (enam belas) Program dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Anggaran

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.995.400,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.288.767.950,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	764.851.872,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.700,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.537.000,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.496.000,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.800,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.640.000,00

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.994.400,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.000.000,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.994.750,00
6	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	309.014.774,00
7	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	77.560.000,00
8	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.700,00
9	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	440.794.300,00
10	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	92.469.600,00
11	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	460.964.500,00
12	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7.424.967.100,00
13	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	87.416.100,00
14	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	99.996.500,00
15	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	415.446.200,00

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	195.850.364,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	667.644.476,00
16	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	75.000.000,00
	JUMLAH		18.605.612.778,00

a. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan DPPA Tahun 2021

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2021 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.**18.605.612.778,00** yang terbagi dalam 16 (enam belas) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 94,23% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp.**17.478.907.514,00**. Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori penilaian **Sangat Baik**.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan berserta capaian kinerja berdasarkan target kinerja pada Renstra 2021-2026 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Target Kinerja
Fisik dan Keuangan

No	Program	Kegiatan	Keuangan		Fisik	
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.995.400,00	92.040.400,00	4 Dokumen	12 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.288.767.950,00	5.866.607.838,00	12 Bulan	12 Bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	764.851.872,00	703.145.942,00	12 Bulan	12 Bulan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.700,00	10.957.100,00	12 Bulan	12 Bulan

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.537.000,00	71.015.000,00	4 Unit	11 Unit
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.496.000,00	23.892.000,00	2 Jenis	2 Jenis
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.800,00	8.373.600,00	2 Jenis	2 Jenis
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.640.000,00	8.640.000,00	2 Jenis	2 Jenis
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000,00	139.900.000,00	25 Kali	41 Kali
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.994.400,00	1.258.000,00	100 Eks	189 Eks
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.000.000,00	161.997.671,00	12 Bulan	12 Bulan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.994.750,00	97.847.612,00	24 Unit	24 Unit
6	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	309.014.774,00	277.533.282,00	30 Koperasi	32 Koperasi
7	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	77.560.000,00	77.346.611,00	20 Koperasi	24 Koperasi
8	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.700,00	45.950.288,00	20 Koperasi	21 Koperasi
9	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	440.794.300,00	308.095.046,00	15 UKM	15 UKM
10	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	92.469.600,00	66.941.800,00	120 SKA	225 SKA
11	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	460.964.500,00	421.760.739,00	2 Pasar	2 Pasar

12	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7.424.967.100,00	7.226.227.833,00	2 Pasar	2 Pasar
13	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	87.416.100,00	81.788.000,00	12 Laporan	12 Laporan
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	99.996.500,00	73.865.595,00	11 Kecamatan	11 Kecamatan
14	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	474.212.292,00	462.811.365,00	250 UTPP	1200 UTPP
15	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	415.446.200,00	390.056.934,00	1 Dokumen	-
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	195.850.364,00	180.256.966,00	4 Kali	4 Kali
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	667.644.476,00	628.691.632,00	10 IKM	10 IKM
16	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	75.000.000,00	51.906.260,00	12 Laporan	12 Laporan
	JUMLAH		18.605.612.778,00	17.478.907.514,00		

b. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 94%, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau . Berdasarkan Perbup No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,

maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :

- Sulitnya pemenuhan data kebutuhan masyarakat yang ada pada Bidang Bina Usaha Perdagangan yang mencakup seluruh kebutuhan pokok yang ada dan digunakan oleh masyarakat Kabupaten Berau. Salah satu contohnya adalah data Beras, Diskoperindag Kabupaten Berau hanya mempunyai data beras yang berasal dari luar daerah Kabupaten Berau saja, dan tidak mempunyai data beras yang beredar di pasaran yang berasal dari dalam daerah Kabupaten Berau itu sendiri. Hal ini berlaku juga untuk barang-barang kebutuhan pokok yang lainnya. Sehingga presentase pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat dihitung;
- Data Ekspor yang ada di Diskoperindag Kabupaten Berau dalam hal ini Bidang Bina Usaha Perdagangan hanya meliputi data Ekspor yang berasal dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Data ini hanya mewakili sekitar 60% data ekspor yang sesungguhnya ada di Kabupaten Berau. Selain itu, data SKA sebagian besar adalah data ekspor Migas. Sehingga tidak valid untuk digunakan sebagai perhitungan target capaian kinerja sektor Ekspor Kabupaten Berau apabila target kinerja yang diminta adalah data ekspor non migas;
- Tidak terpenuhinya target persiapan Gedung UPTD Metrologi pada tahun 2020 mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan Kemetrologian
- Tidak tersedianya dana Bimbingan Teknis bagi pelaksana di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengakibatkan minimnya kegiatan peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia, sementara kebutuhan akan bimbingan dan semakin cepatnya pembaharuan informasi tidak dapat di atasi.
- Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan pada Subbag Penyusunan Program dan urusan Perkoperasian, Perdagangan serta Perindustrian menghambat pencapaian kinerja yang diharapkan.
- Kurangnya dukungan dana untuk melaksanakan inovasi-inovasi yang di rencanakan, serta dalam hal peningkatan sarana pelayanan public

- Pagu anggaran setiap tahun masih sangat minim

b. Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut :

- Data Ekspor dapat dipenuhi apabila data yang dicantumkan tidak terbatas pada non migas, karena Ekspor yang tercapat melalui Surat Keterangan Asal (SKA) sebagian besar merupakan data Ekspor MIGAS.
- Target kinerja untuk menghitung pencapaian keberhasilan disektor wirausaha, sebaiknya menggunakan perhitungan yang lebih dapat dihitung, seperti pengukuran keberhasilan wirausaha berdasarkan omset yang dihasilkan, lapangan kerja yang disediakan, jumlah tenaga kerja yang terserap dsb.
 - o Pada tahun 2020, Kegiatan Operasional dan Administratif pada UPTD Metrologi Legal dilakukan di bangunan kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- Diperlukan dukungan dana dalam peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan teknis
- Diperlukan tambahan SDM dengan keahlian yang sesuai untuk menunjang kinerja OPD
- Agar inovasi layanan dapat berjalan maksimal perlu disediakan anggaran yang memadai sesuai peruntukannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
- Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau mohon untuk dapat di prioritaskan pagu anggaran yang memadai setiap tahunnya.

3.2 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau berdasarkan Indokator Kinerja

Utama menunjukkan hasil yang memuaskan. Data menunjukkan penambahan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang dikembangkan melalui pembinaan, pemantauan dan pelatihan naik sebesar 11,47 % (102 IKM) dibanding angka tahun 2020 yaitu 889 IKM. Sehingga Jumlah total IKM yang dikembangkan untuk tahun 2021 adalah sebanyak 991 IKM.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada pencapaian target kinerja IKM yang menggunakan teknologi Industri Pada tahun 2020 jumlah IKM yang terdata menggunakan teknologi industri adalah sebanyak 472 IKM, sedangkan untuk tahun 2020, jumlah IKM yang menggunakan teknologi industri naik menjadi 496 IKM.

Selanjutnya untuk perhitungan kontribusi PDRB dari sector perdagangan, capaian kinerja pada Indikator kinerja utama Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan didasarkan pada hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, mengingat data yang diperlukan dalam perhitungan PDRB sangat kompleks. Data BPS pada tahun 2021 untuk kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 3,92% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 4,2%.

Dari sisi Koperasi dan UKM, pencapaian target kinerja Dinas Koperasi dihitung berdasarkan jumlah UKM yang memiliki keunggulan kompetitif. Pada tahun 2018 jumlah UKM yang terdata memiliki keunggulan kompetitif adalah sebesar 201 UKM dan meningkat menjadi 237 UKM pada tahun 2021. Selain itu diukur pula capaian kinerja berdasarkan jumlah UMKM yang diberikan pembinaan serta bantuan permodalan. Pada tahun 2020, jumlah UMKM yang terdata telah mendapatkan binaan pelatihan berjumlah 48 UMKM, dan meningkat 100% selama tahun 2021 menjadi 96 UMKM.

Realisasi pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target	CAPAIAN
			2021	2021

1	Meningkatkan Peran Serta Koperasi dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah			
		Presentase Koperasi Aktif	54%	62%
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	31%	40%
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	24%	20%
		Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	12%	0,5%
2	Meningkatkan Peran Serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah UMKM Aktif	2155 UMKM	1350 UMKM
		Jumlah Usaha mikro dan kecil	2009	42
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	41%	24%
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,1%	0,4%
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,1%	0,5%
3	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Barang penting bagi Masyarakat, Agen Distributor dan Pelaku Usaha			
		Presentase Eksportir Baru yang Menggunakan SKA	31%	42%
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0,2%	0,5%
		Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	12%	0,2%
		Presentase Peningkatan jumlah konsumen yang dilayani melalui Tera/Tera Ulang	32%	12%
		Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif	40%	70%
4	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap pengembangan perekonomian daerah			
		Jumlah Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0,6%	1%
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	12%	11%
		Presentase Pengendalian Izin Usaha Industri terhadap jumlah Industri yang terdata		
		Presentase Pengawasan terhadap industri Kecil menengah	0,2%	24%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 telah tercapai

sepenuhnya. Meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan senantiasa memberikan kinerja dan usaha terbaik yang dapat dilakukan guna tercapainya target kinerja program dan kegiatan yang telah dirancang bersama.

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kata efisiensi umumnya berkaitan dengan minimnya sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila ada perbaikan dalam prosesnya, bisa dari segi lebih cepat atau lebih murah. Efisiensi dapat pula ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang waktu, biaya serta tenaga.

Realisasi Sisa 2021 sebesar Rp. 491.160.588,- merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto. SiLPA ini terdiri dari :

Tabel 3.5
Rincian SiLPA

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.	4.1.2	Retribusi Pelayanan Pasar	(635.544.676)
2	5.1.1	Belanja Pegawai	461.034.112
3	5.2.2	Belanja Barang	657.067.052
4	5.2.3	Belanja Modal	8.604.100

C. Sumber Daya Manusia

Adapun Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 67 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, terdiri dari SD

sebanyak 6 orang, SLTP sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 26 Orang, DIPLOMA II/III (D-2 / D-3) sebanyak 5 orang, STRATA 1 sebanyak 25 orang, STRATA 2 sebanyak 3 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	6
2	SLTP	2
3	SLTA	26
3	DIPLOMA II/III (D-2 / D-3)	5
4	STRATA 1	25
5	STRATA 2	3
6	STRATA 3	0
	JUMLAH	67

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Diskoperindag Kab. Berau

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau. Akan tetapi, pada bidang Bina Usaha Perdagangan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada UPTD Metrologi dan lain-lain dalam layanan lingkup koperindag disamping melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun fungsional.

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Daftar Pangkat dan Golongan
Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau
Tahun 2019

NO	Pangkat / Golongan	JUMLAH
1	Juru Muda/IA	0
2	Juru Muda TK. I/IB	0
3	Juru/IC	5
4	Juru TK. I/ID	1
5	Pengatur Muda/IIA	2
6	Pengatur Muda TK. I/IIB	3
7	Pengatur/IIC	8
8	Pengatur TK. I/IID	7
9	Penata Muda/IIIA	8
10	Penata Muda TK. I/IIIB	10
11	Penata /IIIC	4
12	Penata TK. I/IIID	12
13	Pembina /IVA	4

14	Pembina TK I/IVB	2
15	Pembina Utama Muda/IVC	1
16	Pembina Utama Madya/IVD	0
17	Pembina Utama/IVE	0
	JUMLAH	67

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Diskoperindag Kab. Berau

Sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, tercatat 51,02% pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau adalah golongan III, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 1 dan SLTA. Jumlah pegawai golongan I dan II dengan latar belakang Pendidikan SD dan SLTP masih cukup besar yaitu 38,24% dari total 67 pegawai. Oleh karna itu Diskoperindag perlu terus melakukan pembelajaran dan bimbingan bagi pegawai untuk dapat mengatasi kemajuan teknologi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan pada Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8

**Daftar Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Berau Tahun 2021**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pejabat Struktural	23
2	Pejabat Fungsional	2
	JUMLAH	25

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Diskoperindag Kab. Berau

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan juga dari segi tingkat pendidikan belum cukup

komposisi perbandingan antara sarjana dengan non sarjana untuk mengisi jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau belum dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau terdiri dari ruangan Kepala Dinas, ruangan Sekretaris, ruangan sekretariat, ruangan Penyusunan Program dan Pelaporan, ruang arsip, ruang rapat staf, ruang pertemuan, ruangan bidang Bina Usaha Perdagangan, ruangan Bidang Sarana Perdagangan, ruangan Bidang Industri, ruangan Bidang Koperasi dan UMKM, ruangan pelayanan umum, ruangan Keuangan, ruang laktasi, Gudang dan dapur. Saat ini tidak ada barang yang baik tetapi tidak digunakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 3.30 dibawah ini :

Tabel 3.8
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Sarana dan prasarana yang perlu ditambahkan	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	4	2 mobil box untuk sarana Pasar murah	
2	Kendaraan Roda 2	22	8 Kendaraan roda 2 untuk Kasi/ Kasubbag dan Ka. UPTD	
3	Gedung Kantor	1	1 Gedung khusus untuk sarana Metrologi	

4	Kursi	193	-	
5	Meja	186	-	
6	Komputer PC	19	10 Komputer PC untuk penunjang kegiatan Sekretariat dan Bidang Pelayanan	
7	Printer	17	6 printer scanner untuk penunjang kegiatan sekretariat dan bidang	
8	Note Book / Laptop	24	6 laptop untuk operator dan pelaksana di bidang teknis	
9	Air Conditioner	21		
10	Papan Struktur Organisasi	1		
11	Papan Pengumuman	1		
12	UPS	2		
13	Lemari Arsip	4	2 buah lemari arsip dengan box arsip	
14	Brankas	1	-	
15	Mesin Ketik Manual	3	-	
16	Wireless	2	-	
17	Mesin Foto Kopi	0	2 Buah mesin fotokopi	
18	Televisi	4		
19	Dispenser	6	2 buah dispenser dan kulkas untuk ruang tunggu pelayanan dan	

			ruang laktasi	
20	Infocus/Proyektor	2		

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 94%, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau . Berdasarkan Perbup No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :

- Sulitnya pemenuhan data kebutuhan masyarakat yang ada pada Bidang Bina Usaha Perdagangan yang mencakup seluruh kebutuhan pokok yang ada dan digunakan oleh masyarakat Kabupaten Berau. Salah satu contohnya adalah data Beras, Diskoperindag Kabupaten Berau hanya mempunyai data beras yang berasal dari luar daerah Kabupaten Berau saja, dan tidak mempunyai data beras yang beredar di pasaran yang berasal dari dalam daerah Kabupaten Berau itu sendiri. Hal ini berlaku juga untuk barang-barang kebutuhan pokok yang lainnya. Sehingga presentase pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat dihitung;

- Data Ekspor yang ada di Diskoperindag Kabupaten Berau dalam hal ini Bidang Bina Usaha Perdagangan hanya meliputi data Ekspor yang berasal dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Data ini hanya mewakili sekitar 60% data ekspor yang sesungguhnya ada di Kabupaten Berau. Selain itu, data SKA sebagian besar adalah data ekspor Migas. Sehingga tidak valid untuk digunakan sebagai perhitungan target capaian kinerja sektor Ekspor Kabupaten Berau apabila target kinerja yang diminta adalah data ekspor non migas;
- Tidak terpenuhinya target persiapan Gedung UPTD Metrologi pada tahun 2020 mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan Kemetrologian
- Tidak tersedianya dana Bimbingan Teknis bagi pelaksana di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengakibatkan minimnya kegiatan peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia, sementara kebutuhan akan bimbingan dan semakin cepatnya pembaharuan informasi tidak dapat di atasi.
- Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan pada Subbag Penyusunan Program dan urusan Perkoperasian, Perdagangan serta Perindustrian menghambat pencapaian kinerja yang diharapkan.
- Kurangnya dukungan dana untuk melaksanakan inovasi-inovasi yang di rencanakan, serta dalam hal peningkatan sarana pelayanan public
- Pagu anggaran setiap tahun masih sangat minim

B. Saran

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut :

- Data Ekspor dapat dipenuhi apabila data yang dicantumkan tidak terbatas pada non migas, karena Ekspor yang tercapat melalui Surat Keterangan Asal (SKA) sebagian besar merupakan data Ekspor MIGAS.
- Target kinerja untuk menghitung pencapaian keberhasilan disektor wirausaha, sebaiknya menggunakan perhitungan yang lebih dapat dihitung,

seperti pengukuran keberhasilan wirausaha berdasarkan omset yang dihasilkan, lapangan kerja yang disediakan, jumlah tenaga kerja yang terserap dsb.

- Pada tahun 2021, Kegiatan Operasional dan Administratif pada UPTD Metrologi Legal dilakukan di bangunan sementara yang bersifat kontrak / sewa melalui APBD Kabupaten Berau.
- Diperlukan dukungan dana dalam peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan teknis
- Diperlukan tambahan SDM dengan keahlian yang sesuai untuk menunjang kinerja OPD
- Agar inovasi layanan dapat berjalan maksimal perlu disediakan anggaran yang memadai sesuai peruntukannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
- Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau mohon untuk dapat di prioritaskan pagu anggaran yang memadai setiap tahunnya.

Lampiran 1

Evaluasi Renja 2021

Lampiran 2

Rencana Aksi

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja

Lampiran 5

Rencana Kinerja Tahunan